

## DPRD Minta BPK Lakukan Audit



ilustrasi : [www.dakwatuna.com](http://www.dakwatuna.com)

GUNUNGKIDUL— Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, DIY, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)<sup>1)</sup> mengaudit proyek<sup>2)</sup> pembangunan Instalasi Gawat Darurat dan unit radiologi RSUD Wonosari yang diduga bermasalah. “Begitu mendengar proyek belum jadi sudah mau diresmikan, kami langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Hasilnya memang benar bahwa bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD)<sup>3)</sup> masih belum sempurna,” kata Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto di Gunungkidul, Ia mengatakan Sidak dilaksanakan pada Sabtu (31/12) kemarin untuk mengetahui sejauh mana perkembangan bangunan. Diketahui bangunan IGD dengan nilai Rp 8,2 miliar sempat akan diresmikan oleh bupati namun gagal. Purwanto menilai bangunan belum layak mulai dari atap yang bocor, lantai yang terpasang beberapa di antaranya tidak terpasang sempurna. Purwanto mengaku sudah memberikan masukan kepada pihak manajemen untuk segera melakukan pembenahan. Selain itu, ia mengatakan perencanaan di RSUD sangat lemah dan lamban. Anggaran untuk konsultan perencana juga sangat kecil.

“Bagaimana mau baik dengan anggaran konsultan perencana Rp 50 juta untuk bangunan dengan nilai Rp 8,2 miliar tersebut,” katanya. Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi mengatakan saat awal perencanaan pihaknya sudah meminta pembangunan gedung dengan nilai cukup besar tersebut bisa didahulukan. Namun kenyataannya dikerjakan akhir tahun.

“Proyek tersebut diserahkan 27 Desember lalu, namun kenyataannya banyak kekurangan yang perlu dibenahi,” katanya. Ia mengatakan seharusnya pihak manajemen tidak tergesa-gesa untuk meresmikan karena bangunan belum sempurna. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemkab untuk melakukan audit terkait pembangunan tersebut, dilakukan oleh BPK. “Kami mendorong untuk diaudit, semuanya agar terbuka,” katanya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Hery Kriswanto menambahkan pembangunan yang masih belum sempurna, seharusnya tidak elok untuk dilakukan peresmian.

“Kalau memang diresmikan seharusnya langsung bisa digunakan. Dengan melihat kondisi bangunan yang masih belum sempurna, seharusnya tidak dilakukan. Kasihan masyarakat jika mengetahui sudah diresmikan tetapi belum bisa digunakan,” katanya.

Sementara PPID RSUD Wonosari Aris Suryanto mengatakan proses pembangunan masih tanggung jawab rekanan. Sehingga saat Sidak kunci beberapa ruangan masih dipegang pihak rekanan. “Kami tetap tekankan untuk selesai sesuai dengan kesepakatan,” katanya.

## Sumber Berita

1. Dok.Joglosemar.co.,Senin Tanggal 2 Januari 2017: DPRD Minta BPK lakukan Audit.
2. Harianjogja.com., Tanggal 2 Januari 2017: Pembangunan Gunungkidul, Dewan minta BPK Audit Pembangunan RSUD.
3. jogja.Antarane.com., Tanggal 1 Januari 2017: BPK diminta audit pembangunan IGD RSUD Wonosari

## Catatan

1. Pasal 6 ayat 1 dan 3 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan antara lain disebutkan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Pasal 6 ayat 3 disebutkan, Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
3. Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disebutkan Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

- 
- 1) Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya (dan biasanya selalu dibatasi oleh waktu, dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan), untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan.
  - 3) Instalasi Gawat darurat (IGD) adalah pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan multi disiplin.